

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TOJABI KECAMATAN LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA

Rezky nur ilmi (1465140024)

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.

Email : rezkynurilmi04@gmail.com

ABSTRAK. *Evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa di desa Tojabi kecamatan lasusua kabupaten kolaka utara. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Ismail dan Muh Nur Yamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan salah satu strategi pemerintahan untuk membantu agar desa menjadi mandiri, dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat dari segi pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan mengelola dana desa. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu aparat desa dan masyarakat Desa Tojabi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan metode Miles, Huberman dan Saldanaya itu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa masyarakat Desa Tojabi berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan dana desa melalui pilihan pengguna dan manfaat sosial. Bentuk kegiatan masyarakat berupa pikiran, tenaga, dan materi.*

Kata kunci: *kegiatan dana desa, deskriptif, evaluasi kebijakan,*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan secara umum pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu. Dalam hal ini, masyarakat merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan yang dilakukan diberbagai negara/daerah yang dilakukan oleh masyarakat terutama pemerintah dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Kebijakan yang ada di daerah membutuhkan kesesuaian dengan keadaan yang nyata (rill) kepada masyarakat lokal. Ketidak sesuaian antara pembangunan dengan keadaan

masyarakat akan melahirkan kebijakan yang sulit untuk mencapai efektivitas dan optimalisasi sehingga peran masyarakat dalam pembangunan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat mandiri merupakan hal yang mutlak bagi terwujudnya kemandirian yang sejahtera.

Di era reformasi saat ini di segala bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah merubah tatanan lembaga publik di Indonesia untuk mewujudkan hal itu.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja desa, dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dana desa nantinya akan mendapatkan penyaluran, pemantauan dan evaluasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Negara (APBDN).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Adapun rincian dana desa perkabupaten/kota diantaranya; berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
2. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
4. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Dana desa untuk menunjang segala sektor dimasyarakat. Dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu

hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintahan desa.

Dari kedua penelitian terdahulu tersebut menjadi referensi bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, namun terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu yakni pada penelitian yang akan peneliti lakukan untuk mengetahui evaluasi kebijakan dalam pengelolaan dana desa di desa tojabi kecamatan lasusua kabupaten kolaka utara. Mengingat alokasi dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan Di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, maka evaluasi kebijakan terhadap dana desa sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan, kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan di desa. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk mengangkat judul **“Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara”**.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka rumusan penelitian adalah masalah Bagaimana evaluasi kebijakan kegiatan pengelolaan dana desa di desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Evaluasi Kebijakan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Di desa

Tojabi Kecamatan Lasususa Kabupaten Kolaka Utara.

4. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian evaluasi

Evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam praktis profesi¹. Evaluasi dilakukan untuk mengukur/mengetahui bagaimana hasil terhadap kinerja kebijakan yang telah dibuat.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat.

c. Indikator Evaluasi

Tabel 1: Indikator Evaluasi Kebijakan

No.	Kriteria	Penjelasan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2.	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3.	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat

		preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5.	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber: Subarsono (2016)

d. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang yang dicakup dari kata politis, yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.

e. Model Evaluasi Kebijakan

Untuk mengevaluasi suatu kebijakan, mengemukakan beberapa Model Evaluasi Kebijakan Publik Haouse dalam Soenarkodikutip dari Suaib yang terdiri dari “*The Adversary Model, The Transaction Model, & The Good Free Model*”² dapat dijelaskan secara detail model evaluasi kebijakan publik :

1. The Adversary Model

Para evaluator dikelompokkan menjadi dua, yang pertama bertugas menyajikan hasil evaluasi program yang positif, hasil dampak kebijakan yang efektif dan baik, tim kedua berperan untuk menemukan hasil evaluasi program negatif, tidak efektif, gagal dan yang tidak tepat sasaran. Kedua kelompok ini dimaksudkan

² Muhammad Ridha Suaib, 2016. *Pengantar Kebijakan Publik, Dari Administrasi Negara, Kebijakan Public, Administrasi Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpulis. Hal. 113

untuk menjamin adanya netralitas serta obyektivitas proses evaluasi. Temuannya kemudian dinilai sebagai hasil evaluasi. Menurut model dari evaluasi ini tidak ada efisiensi data yang dihimpun.

2. *The Transaction Model*

Model ini memperhatikan penggunaan metode studi kasus, bersifat naturalistik dan terdiri dua jenis, yaitu : evaluasi responsif I yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan secara informal, berulang-ulang agar program yang telah direncanakan dapat digambarkan dengan akurat; dan evaluasi iluminativ (*illuminativ evaluation*) bertujuan untuk mengkaji program inovatif dalam rangka mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Jadi evaluasi model ini akan berusaha mengungkapkan serta mendokumenter pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program.

3. *Good Free Model*

Model evaluasi ini bertujuan untuk mencari dampak aktual dari suatu kebijakan, dan bukan hanya sekedar untuk menentukan dampak yang diharapkan sesuai dengan ditetapkan dalam program. Dalam upaya mencari dampak aktual, evaluator tidak perlu mengkaji secara luas dan mendalam tentang tujuan dari program yang direncanakan. Sehingga evaluator (peneliti) dalam posisi yang bebas menilai dan ada obyektif.

5. KERANGKA KONSEPTUAL

Agar pengelolaan dana desa dikelola dengan baik, kita dapat melihat dengan menggunakan Evaluasi Model Goal-Free

Pilihan Pengguna Manfaat Sosial .Dan dapat melihat apakah keberhasilan yang di capai dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat.

6. METODE PENELITIAN.

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan lapangan karena bersifat dinamis.

7. ANALISIS DATA

a. Kondensasi Data

Miles, Huberman Dan Saldana (2014) "*Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/or transforming the data that appear in the full corpus (body) of written-up field notes, interview, transcripts, documents, and other empirical materials*". Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, menyederhanakan, penguraian, dan atau transformasi data yang muncul dalam corpus penuh dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dengan kata lain, kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan dari berbagai materi empiris diatas³

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data-data pokok yang telah dirangkum sebelumnya ke dalam bentuk bagan dan penjelasan data dalam bentuk teks. Peneliti

memberikan pemaparan tentang data-data yang ditemui dan telah difilter pada tahap sebelumnya. Pemaparan tersebut berupa penafsiran atau penerjemahan data, agar kemudian dapat dipahami dengan mudah.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

8. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. pilihan pengguna

a. Penggunaan Dana Desa dari segi pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisah dari penggunaan keuangan desa, maka seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari rakyat oleh untuk rakyat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Carl. J Frenrick (2016) mengemukakan bahwa tindakan yang diusulkan seseorang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tentunya dengan menunjukan hambatan-hambatan dan pelaksana-pelaksana usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Keberhasilan evaluasi kebijakan public ditentukan oleh pemahaman para agen pelaksana kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang dimiliki. Jika suatu kebijakan tidak memiliki pemberdayaan masyarakat maka sangat sulit

untuk dievaluasi. Kebijakan dapat dievaluasi dengan baik apa bila para pelaksana kebijakan dapat memahami standard an sasaran kebijakan.

b. Pelaporan pertanggungjawaban

Dalam suatu kebijakan mungkin saja dalam penggunaan dana desa sudah baik, tetapi bukan hanya indikator tersebut yang mempengaruhi evaluasi kebijakan kegiatan pengelolaan dana desa. Bentuk pelaporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan atau aparatur pemerintahan sangat menentukan sukses tidaknya suatu kebijakan. Seperti yang dikatakan Friedrich August Von Hayek bahwa pertanggungjawaban pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul dari perbuatan mereka. Sedangkan menurut George Bernard Shaw bahwa hanya orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun. Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban dana desa didesa tojabi dapat dikatakan cukup baik. Meskipun kadang kali dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada kabupaten mengalami keterlambatan pelaporannya.

Proses pertanggungjawaban ini juga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan karena kebijakan tidak akan jalan dengan maksimal tanpa adanya pelaporan pertanggungjawaban untuk mendukung

evaluasi kebijakan kegiatan pengelolaan dana desa didesa tojab i kecamatan lasusua kabupaten kolaka utara.

c. Potensi desa.

Dana desa merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan yang ada didesa. Salah satunya untuk mengembangkan potensi desa dan juga digunakan secara tepat guna untuk usaha produktif yang menciptakan lapangan pekerjaan yang ada didesa. Arti potensi menurut Myles Munroe adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Program desa yang bersumber dari dana desa telah dilaksanakan pemerintah desa sesuai usulan dan kebutuhan masyarakat Desa Tojab i. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat dalam aktifitas sehari-hari.

Masyarakat Desa Tojab i merasa bahwa semua kegiatan yang dilakukan dapat mengembangkan potensi di Desa Tojab i Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Pada pemeliharaan, dan pengembangan masyarakat melakukan upaya atau tindakan untuk menjaga atau memelihara potensi yang dimiliki desa yang telah terlaksana seperti pengembangan potensi dalam bidang pertanian.

2. Manfaat sosial

a. Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan

yang berwujud kontribusi. Hal ini agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Pemerintah desa Tojab i dalam merealisasikan program-program yang direncanakan lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan adalah pelaksana teknis dari program yang akan dikerjakan berasal dari masyarakat yang ada di dusun ataupun di desa tersebut. Dalam pelaksanaannya ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat seperti Kontribusi dengan tenaga.

Seperti yang dikatakan Sumaryadi dalam bukunya bahwa partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga dan waktu. Sedangkan menurut Djalal dan Supriadi mengatakan bahwa partisipasi adalah pembuat keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa.

b. Sumber daya manusia

Suatu kebijakan mungkin saja partisipasi dalam manfaat sosialnya sudah baik, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi kegiatan pengelolaan desanya dalam suatu kebijakan. SDM sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu kegiatan. Dana desa ini membutuhkan sumber daya yang memadai untuk mengelola kebijakan ini, karena tanpa adanya sumber daya manusia yang

memadai maka kebijakan tidak akan berjalan secara efektif.

Teori Van Meter dan Van Horn tersebut tentang sumber daya manusia dalam evaluasi kebijakan sejalan dengan yang dikemukakan oleh George C Edward dalam subarsono mengemukakan bahwa sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan sejalan dengan yang dikemukakan secara jelas tetapi apabila evaluator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka evaluasi tidak berjalan secara efektif.

c. Kendala dalam penggunaan dana desa

Pada tahapan ini, masyarakat lebih ditekankan pada peran untuk mengawasi pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana desa. sehingga masyarakat mampu memberikan masukan baik itu berupa kritik ataupun saran kepada pemerintah desa, agar hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan juga sesuai yang direncanakan sebelumnya. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dana desa, evaluasi sebuah kebijakan perlu didukung kordinasi atau komunikasi untuk menjalankan kebijakan atau kegiatan yang ada didesa.

Untuk itu diperlukan kerjasama agar tujuan dari kebiakan dalama kegiatan tersebut dapat tercapai sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Keberhasilan evaluasi kebijakan masyarakat agar evaluasi mengetahui apa yang harus dilakukan maka perlu melakukan interaksi antara satu sama lain. Sesuai yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn bahwa evaluasi kebijakan sebuah kegiatan

perlu didukung dan adanya interaksi dengan instansi atau pihak yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dna desa.

Namun dalam proses pelaksanaan tersebut tidak bisa di pungkiri masih terdapat kendala teknis yang dirasakan, seperti.

a. Asas gotong royong sulit terlaksana
Salah satu pemicu hal demikian bisa terjadi karena adanya anggapan di masyarakat bahwa program kegiatan yang dilakukan tersebut sudah mendapat anggaran dari dana desa yang nantinya akan dikerjakan oleh masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau tukang.

b. Sulitnya pembebasan lahan
Walaupun pada akhirnya masyarakat suka rela untuk menghibahkan tanahnya untuk dilakukan pembangunan namun dalam proses negosiasinya terkadang hal ini juga menjadi kendala karena terkadang ada masyarakat yang mengharapkan adanya ganti rugi.

c. Kesibukan kerjaan
Kesibukan karena kerjaan juga menjadi salah satu kendala oleh sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan seperti pemerintah desa mempekerjakan masyarakat secara bergiliran, mengadakan kerja bakti di setiap dusun yang di koordinir oleh kepala dusun walaupun hal itu bukan dalam

rangka pelaksanaan dari anggaran dana desa dan ada penyampain kepada masyarakat untuk terkait membudayakan gotong royong.

9. KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dengan Berdasar dari penyajian data, analisis data dan interpretasi data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pilihan pengguna
 1. Pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Tojabi terlaksana dengan baik karna kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan seperti pelatihan jahit-menjahit dan pelatihan kelembagaan sudah berjalan dengan baik.
 2. Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah setempat telah baik karena sesuai dengan prosedur yang ada.
 3. Potensi desa yang dimiliki baik karna masyarakat setempat dapat mengembangkan potensi yang dimiliki desa Tojabi.
- b. manfaat sosial
 1. partisipasi, yang dilakukan oleh masyarakat desa Tojabi dalam proses pelaksana kegiatan pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik karna mereka dilibatkan langsung dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah setempat.
 2. Sumber daya manusia yang baik, karna dapat menjalankan tugas yang diberikan dalam proses kegiatan

yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

3. Kendala dalam penggunaan dana nya tidak ada kendala karna dalam kegiatan penggunaan dana desa sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

10. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2009. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Makmur, dan Thanhier, Rohana. 2016. *Konseptual dan kontekstual administrasi dan organisasi terhadap kebijakan publik*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miles, M.B, Heberman, A. M. Dan Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed)*, London: Sage Publication Ltd.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan publik formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT Elex Komputindo.

———. 2009. *Publi policy Terori kebijakan, analisis kebijakan, proses kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi, revisi risk manajemen dalam kebijakan publik, kebijakan sebagai the fifth estate metode penelitian kebijakan*. Jakarta: PT Elex Komputindo.

———. 2011. *Public policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan Teori & Model Perumusan Implementasi Pengendalian Monitoring & Evaluasi Risk Management Kebijakan Unggu The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT Elex media komputindo

———. 2006. *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang*. Jakarta: PT Gramedia.

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi (Research And Development / R&D)*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2008 *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Suaib, Ridha 2016 *pengantar kebijakan public dari administrasi Negara, kebijakan public, pelayanan public, good governance hingga implementasi kebijakan*, Yogyakarta: CALPULIS

Winarno, Budi. 2012. *kebijakan publik teori, proses, dan studi kasus*, Yogyakarta: PT Buku Seru.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan publik teori dan proses*, Yogyakarta: PT Buku Kita.

Sumber hukum

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten kolaka utara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang

Pemerintah Desa. Pdf

Peraturan Daerah Kabupaten kolaka utara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa. Pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Pasal 1 Pdf

Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaun, dan evaluasi Dana Desa. Pdf

Permen Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 Tanggal 16 Maret 2007 tentang

Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Pdf

Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pdf

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Pdf

Permendagri No. 113/2014 pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pdf

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pdf

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 Tentang Pemerintahan Daerah. Pdf

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Pdf

UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa. Pdf

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah. Pdf

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. Pdf

Skripsi

Alif Hazmi Istifazhuddin. 2016 .*Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Add (Alokasi
Dana Desa) Di Desa Nguwok*

*Kecamatan Modo Kabupaten
Lamongan*.jurnal. S1. FISIP,
Universitas Airlangga

Handhyka Setyawan Dkk 2016.*Evaluasi
Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add)
Didesa Senakin Kecamatan Sengah
Temila Kabupaten Landak*.jurnal. S1.
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
universitas tanjung pura pon.